



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGIAN MADRASAH  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penergian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

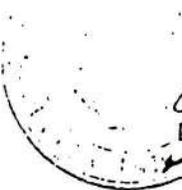
#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



*Taher*  
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KETERANGAN
		URUT	MAD				
		18	5	Madrasah Aliyah Negeri Tegal Rejo	Madrasah Aliyah Negeri Filial Tegal Rejo, Jl. Paklaman Kec. Tegal Rejo Kab. Magelang	Kab. Magelang	
		19	6	Madrasah Aliyah Negeri 3 Sragen	Madrasah Aliyah Negeri Sragen Filial di Kalijambe, Sragen, Kec. Kalijambe Kab. Sragen	Kab. Sragen	
		20	7	Madrasah Aliyah Negeri Gombong	Madrasah Aliyah Negeri Kebumen Filial di Gombong Kec. Gombong Kab. Kebumen	Kab. Kebumen	
		21	8	Madrasah Aliyah Negeri Popongan	Madrasah Aliyah Negeri Karangnorn Filial di Popongan Kec. Karangnorn Kab. Klaten	Kab. Klaten	
		22	9	Madrasah Aliyah Negeri Kroya	Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial di Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
9	D.I. Yogyakarta	23	1	Madrasah Aliyah Negeri Tempel	Madrasah Aliyah Negeri Filial Sleman Kec. Tempel Kab. Sleman	Kab. Sleman	
10	Jawa Timur	24	1	Madrasah Aliyah Negeri Ngerambe	Madrasah Aliyah Negeri Filial Ngumpak Ds. Pucangan Kec. Ngerambe Kab. Ngawi	Kab. Ngawi ✓	
		25	2	Madrasah Aliyah Negeri Dolopo	Madrasah Aliyah Negeri Filial Doho Ds. Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun	Kab. Madiun	
		26	3	Madrasah Aliyah Negeri Rejosari Kebonsari	Madrasah Aliyah Negeri Filial Rejo - sari, Kel. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun	Kab. Madiun	

NO	PROVINSI	MADRASAH		NAMA MADRASAH	FEDERASI	KAB./KODYA	KEITERANGAN
		URUT	MAD				
11	Kalimantan Selatan	38	15	Madrasah Aliyah Negeri Kauman	Madrasah Aliyah Negeri Depok Filial di Kauman	Kab. Jombang	
		39	1	Madrasah Aliyah Negeri 4 Barabai	Madrasah Aliyah Negeri Filial Pontai Hambawang, Jl. Puspa Myndro Pontai Pantai Hambawang Timur Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
12	Kalimantan Barat	40	1	Madrasah Aliyah Negeri Singkawang	Madrasah Aliyah Negeri I Pontianak Filial Singkawang Kab. Sambas	Kab. Sambas	
13	Sulawesi Selatan	41	1	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Utara	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Sinjai Jl. A. Mandasin No. 2 Kel. Palangnina Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		42	2	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Timur	Madrasah Aliyah Negeri Filial Sinjai Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
14	Maluku	43	1	Madrasah Aliyah Negeri Galela	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Galela	Kab. Maluku Utara	
		44	2	Madrasah Aliyah Negeri Sanana	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Sanana	Kab. Maluku Utara	

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERILAGAMA REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*  
 DR. H. TARMIZI TAJER



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 673 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 673 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 83 (DELAPAN PULUH TIGA)  
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Timur	MAN Ponorogo	MAN 1 Ponorogo
2	Jawa Timur	MAN Ponorogo II	MAN 2 Ponorogo
3	Jawa Timur	MAN Trenggalek	MAN 1 Trenggalek
4	Jawa Timur	MAN Panggul	MAN 2 Trenggalek
5	Jawa Timur	MAN Tulungagung	MAN 1 Tulungagung
6	Jawa Timur	MAN Tulungagung II	MAN 2 Tulungagung
7	Jawa Timur	MAN Rejotangan	MAN 3 Tulungagung
8	Jawa Timur	MAN Situbondo	MAN 1 Situbondo
9	Jawa Timur	MAN 2 Situbondo	MAN 2 Situbondo
10	Jawa Timur	MAN Karanganyar Paiton	MAN 1 Probolinggo
11	Jawa Timur	MAN Pajajaran	MAN 2 Probolinggo
12	Jawa Timur	MAN Bangil	MAN 1 Pasuruan
13	Jawa Timur	MAN Kraton	MAN 2 Pasuruan
14	Jawa Timur	MAN Mojosari	MAN 1 Mojokerto
15	Jawa Timur	MAN Mojokerto	MAN 2 Mojokerto
16	Jawa Timur	MAN Jombang	MAN 1 Jombang
17	Jawa Timur	MAN Rejoso Peterongan	MAN 2 Jombang
18	Jawa Timur	MAN Tambak Beras	MAN 3 Jombang
19	Jawa Timur	MAN Denanyar	MAN 4 Jombang
20	Jawa Timur	MAN Genuk Watu	MAN 5 Jombang
21	Jawa Timur	MAN Kebonsari	MAN 6 Jombang
22	Jawa Timur	MAN Keboan	MAN 7 Jombang
23	Jawa Timur	MAN 5 Jombang	MAN 8 Jombang
24	Jawa Timur	MAN 6 Jombang	MAN 9 Jombang

25	Jawa Timur	MAN 7 Jombang	MAN 10 Jombang
26	Jawa Timur	MAN Nglawak Kertosono	MAN 1 Nganjuk
27	Jawa Timur	MAN Nganjuk	MAN 2 Nganjuk
28	Jawa Timur	MAN Prambon	MAN 3 Nganjuk
29	Jawa Timur	MAN Takeran	MAN 1 Magetan
30	Jawa Timur	MAN Temboro	MAN 2 Magetan
31	Jawa Timur	MAN Panekan	MAN 3 Magetan
32	Jawa Timur	MAN Ngawi	MAN 1 Ngawi
33	Jawa Timur	MAN Paron	MAN 2 Ngawi
34	Jawa Timur	MAN Tempursari	MAN 3 Ngawi
35	Jawa Timur	MAN Ngrambe	MAN 4 Ngawi
36	Jawa Timur	MAN Bojonegoro	MAN 1 Bojonegoro
37	Jawa Timur	MAN Bojonegoro II	MAN 2 Bojonegoro
38	Jawa Timur	MAN Ngraho	MAN 3 Bojonegoro
39	Jawa Timur	MAN Baureno	MAN 4 Bojonegoro
40	Jawa Timur	MAN Padangan	MAN 5 Bojonegoro
41	Jawa Timur	MAN Tuban	MAN 1 Tuban
42	Jawa Timur	MAN Rengel	MAN 2 Tuban
43	Jawa Timur	MAN Lamongan	MAN 1 Lamongan
44	Jawa Timur	MAN Babat	MAN 2 Lamongan
45	Jawa Timur	MAN Gresik	MAN 1 Gresik
46	Jawa Timur	MAN 2 Gresik	MAN 2 Gresik
47	Jawa Timur	MAN Jung Cang Cang	MAN 1 Pamekasan
48	Jawa Timur	MAN Pamekasan	MAN 2 Pamekasan
49	Jawa Timur	MAN Kediri II	MAN 1 Kota Kediri
50	Jawa Timur	MAN Kediri III	MAN 2 Kota Kediri
51	Jawa Timur	MAN Malang	MAN 1 Kota Malang
52	Jawa Timur	MAN Malang III	MAN 2 Kota Malang
53	Jawa Timur	MAN Probolinggo	MAN 1 Kota Probolinggo
54	Jawa Timur	MAN 2 Probolinggo	MAN 2 Kota Probolinggo
55	Jawa Timur	MAN Pasuruan	MAN Kota Pasuruan
56	Jawa Timur	MAN Madiun	MAN 1 Kota Madiun
57	Jawa Timur	MAN 2 Madiun	MAN 2 Kota Madiun
58	Jawa Timur	MAN Surabaya	MAN Kota Surabaya

132	Jawa Timur	MIN Gerahan	MIN 4 Jember
133	Jawa Timur	MIN Sempolan	MIN 5 Jember
134	Jawa Timur	MIN Tanggul Wetan	MIN 6 Jember
135	Jawa Timur	MIN Kanigoro	MIN 1 Kediri
136	Jawa Timur	MIN Doko Gampangrejo	MIN 2 Kediri
137	Jawa Timur	MIN Plosolor	MIN 3 Kediri
138	Jawa Timur	MIN Klagen Serut	MIN 1 Madiun
139	Jawa Timur	MIN Bancong Wonoasri	MIN 2 Madiun
140	Jawa Timur	MIN Rejosari	MIN 3 Madiun
141	Jawa Timur	MIN Doho Dolopo	MIN 4 Madiun
142	Jawa Timur	MIN Donomulyo (MIN Kab. Malang)	MIN 1 Malang
143	Jawa Timur	MIN Druju Sumber Manjing Wetan	MIN 2 Malang
144	Jawa Timur	MIN Kalipare	MIN 3 Malang
145	Jawa Timur	MIN Gedog (MIN Gedon Garun)	MIN Kota Blitar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN